

**HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN DENGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI
SERTA KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI DESA HUTA GURGUR KECAMATAN DOLOK SANGGUL**

Ulastri B. J. Simanullang¹, Marihot Manullang², Robert Tua Siregar³, Sarintan E Damanik⁴

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat di dunia baik Negara maju maupun Negara berkembang. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan. Dengan adanya ketimpangan dan kemiskinan ini maka akan sangat sulit untuk melakukan pengembangan wilayah dimasa yang akan datang. Kondisi seperti ini akan akan memicu munculnya permasalahan sosial seperti kecemburuan sosial. Selain itu ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan akan mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi dalam sebuah negara. Kemiskinan tergantung pada pendapatan nasional rata - rata dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Desa Matiti II Kecamatan Dolok Sanggul dengan jumlah populasi sebanyak 996 orang, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 % dari jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 100 orang sampel, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *probability sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah uji signifikansi dengan Koefisien Kontingensi, Kurva Lorenz, Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia (α : 0,05). Hasil yang diperoleh adalah ketimpangan distribusi pendapatan di Desa Matiti II termasuk dalam kategori rendah. Dan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat pendidikan kepala keluarga serta tempat pelayanan kesehatan tetapi ada hubungan yang signifikan antara pendapatan masyarakat dengan tipe rumah yang dimiliki.

Kata Kunci : Pendapatan, Sosial Ekonomi, Ketimpangan Distribusi

ABSTRACT

Inequality in income distribution is a reality that exists in the midst of society in the world, both developed and developing countries. Inequality in income distribution cannot be separated from the problem of poverty. With this inequality and poverty, it will be very difficult to carry out regional development in the future. Conditions like this will trigger the emergence of social problems such as social jealousy. In addition, inequality in income distribution and poverty will affect social and economic development in a country. Poverty depends on the average national income and the degree of inequality in the income distribution. The population in this study were people living in Matiti II Village, Dolok Sanggul District with a total population of 996 people, while the sample used in this study was 10% of the total population, namely 100 samples, using a sampling technique, namely probability sampling technique. The data analysis method used is a significance test with Contingency Coefficients, Lorenz Curves, Gini Coefficients and World Bank Criteria (α : 0.05). The results obtained are inequality of income distribution in Matiti II Village which is included in the low category. And there is no significant relationship between the level of community income and the educational level of the head of the family and the place of health services, but there is a significant relationship between the income of the community and the type of house owned.

Keywords : Income, Socio-Economic, Distribution Inequality

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara sudah pasti tidak akan terlepas dari aktifitas - aktifitas perekonomian. Aktifitas perekonomian ini terjadi dalam bentuk aktifitas kehidupan dan terjadi pada semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun pada masyarakat kalangan atas. Dalam pelaksanaannya, perekonomian selalu menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang.

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara - negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah - tengah masyarakat dunia ini baik negara maju maupun di negara berkembang, dan juga selalu menjadi isu penting untuk ditinjau. Di negara berkembang masalah ketimpangan telah menjadi pembahasan utama dalam menetapkan kebijakan sejak tahun tujuh puluhan. Perhatian ini timbul karena adanya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan semakin meningkatnya ketimpangan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh beberapa ahli ekonomi seperti Adelman dan Morris dalam (Prapti, 2006) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu diikuti dengan meningkatnya ketimpangan terutama pada masa - masa awal pembangunan.

Permasalahan ketimpangan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan. Menurut (Arsyad, 2004), banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1960 - an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan yang terjadi. Banyak negara yang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut di negara sedang berkembang.

Apa yang disebut dengan proses "*trickle down effect*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi. Sebagian besar negara sedang berkembang yang mengalami laju pertumbuhan yang relatif tinggi tidak membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskinnya. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama *kemiskinan absolut*, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, *kemiskinan relatif*, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Mudrajad, 1997). Namun ada beberapa negara yang berhasil menetapkan metode pencapaian pertumbuhan yang tinggi ini, yaitu seperti yang dilakukan oleh negara Jepang, Taiwan dan Korea. Keberhasilan yang mereka raih karena mereka menjadikan wilayah pedesaan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan perbedaan karakteristik antar wilayah di negara ini cukup besar. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu kewajaran bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteraturan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya

mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan untuk tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik dari sisi pembangunan maupun pendapatan antar daerah. Padahal tolak ukur suatu pembangunan dikatakan berhasil dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan makin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar sektor dan antar daerah

Kondisi seperti ini merupakan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh setiap negara berkembang mengingat masalah kemiskinan dan ketimpangan ini dapat menyulitkan dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya. Kondisi ini dapat memicu munculnya permasalahan - permasalahan sosial lainnya seperti kecemburuan sosial dan jika terus dibiarkan akan menimbulkan masalah - masalah lain yang lebih rumit lagi. Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Karenanya ketimpangan tidak dapat dihapuskan, melainkan hanya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses perkembangannya.

Ketidakpuasan dan kritik yang timbul dalam suatu proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sehubungan dengan pertumbuhan yang telah dicapai akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman dan lain-lain. Selain menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, maka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi suatu daerah.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama yaitu pendapatan nasional rata - rata dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Intinya, berapapun tinggi pendapatan perkapita suatu negara jika ketimpangan distribusi pendapatan masyarakatnya sangat tinggi maka tingkat kemiskinan yang terjadi di negara itu pun pasti tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi pendapatan pada suatu daerah relatif merata namun pendapatan perkapitanya rendah maka tingkat kemiskinan juga tinggi.

Kecamatan Dolok Sanggul merupakan salah satu Kecamatan yang beradada di Kabupaten. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan sebuah Kabupaten yang cukup luas wilayahnya yaitu 2.335,33 km². Kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan dengan berbagai macam tipe wilayah, mulai dari wilayah dataran tinggi, dataran rendah dan wilayah pantai. Kecamatan Dolok Sanggul adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kecamatan Dolok Sanggul merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas wilayah yang hanya 2.502,71 km². Kecamatan ini terdiri dari 23 Desa / Kelurahan.

Keterbatasan sarana transportasi menuju ke Desa Matiti II menjadikan wilayah ini menjadi terisolir dari daerah lain di sekitarnya. Kegiatan perekonomian dijumpai toko yang yang berlangsung disana terjadi hanya diantara masyarakat yang tinggal di Desa tersebut. Hanya sedikit orang luar yang mau berkunjung ke sana. Kegiatan perdagangan yang

berlangsung pun hanya yang skala kecil saja, seperti warung di depan rumah. Tidak menjual barang grosiran di sana. Sulitnya aksesibilitas menuju ke Desa Matiti II menjadikan wilayah Desa ini belum berkembang seperti wilayah lain yang ada di sekitarnya.

Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat juga diikuti dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pula. Akibatnya penduduk tidak hanya miskin karena hidup dibawah garis kemiskinan, tetapi juga miskin karena lingkungan sekitar. Artinya walaupun seseorang tidak hidup dibawah garis kemiskinan, namun karena jarak antara pendapatan yang diperolehnya dengan pendapatan orang lain di lingkungannya sangat jauh berbeda, maka dinyatakan sebagai kemiskinan relatif.

Karenanya peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh tingkat pendapatan masyarakat terhadap faktor sosial ekonomi masyarakat dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Desa Matiti II yang tingkat kemiskinannya paling tinggi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sehingga bisa diketahui apakah mereka miskin karena hidup dibawah garis kemiskinan atau juga disebabkan karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan (kemiskinan relatif).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2014) bahwa penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antarvariabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: (1) observasi, (2) wawancara, (3) questioner / angket dan (4) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif. Lalu menggunakan uji chi-square

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara Pendapatan dan Pendidikan

Tabel 1

Hubungan Tingkat pendapatan masyarakat terhadap tingkat pendidikan kepala rumah tangga

		Pendidikan Masyarakat					Total
		(SD)	SD	SMP	SMA	PT	
Pendapatan Masyarakat (Rp/bulan)	Rendah (500.000 – 1.500.000)	6	44	5	4	0	59
	Sedang > 1.500.000 – 2.500.000	0	15	7	2	1	25
	Tinggi > 2.500.000	0	9	6	1	0	16
Total		6	68	18	7	1	100
Nilai Chi Square : 15.898							
Nilai X ² Tabel db = 8 α = 0.05 adalah 15,50731							
Nilai C : 0.3703678							

* (SD) : Tidak tamat SD

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai koefisien kontingensinya adalah < 0,5. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Artinya seorang kepala rumah tangga yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu tingkat pendidikannya juga tinggi, begitupun sebaliknya. Hal ini terlihat dari tabel diatas di mana kepala rumah tangga yang berpenghasilan tinggi dan rendah di Desa Matiti II ternyata memiliki tingkat pendidikan yang cukup beragam. Sehingga walaupun tingkat pendidikan menentukan tingkat pendapatan

namun hal tersebut tidak signifikan. Karena ternyata ada kepala rumah tangga yang hanya tamat SD ternyata memiliki pendapatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan meskipun hanya tamat SD ternyata pengalaman serta kepemilikan modal cukup berpengaruh dalam menentukan pendapatan. Karena hampir seluruh kepala rumah tangga di Desa Matiti II bekerja di Sektor Informal sehingga peran pendidikan tidak begitu diperhitungkan dalam sektor ini.

Hubungan antara Pendapatan dan Kesehatan

Tabel 2

Hubungan antara Tingkat Pendapatan dan Tempat memperoleh Pelayanan Kesehatan

		Tempat pelayanan kesehatan			Total
		Rumah Sakit	Bidan	Beli Obat	
Pendapatan Masyarakat (Rp/bulan)	Rendah (500.000 – 1.500.000)	0	18	41	59
	Sedang > 1.500.000 – 2.500.000	5	13	7	25
	Tinggi > 2.500.000	6	7	3	16
Total		11	38	51	100
Nilai Chi Square : 30.656					
Nilai X ² tabel dengan df = 4 dan α = 0.05 adalah 9.48773					
Koefisien Kontingensi : 0.4843877					

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai koefisien kontingensi antara tingkat pendapatan dan tempat pelayanan kesehatan adalah < 0,5 yaitu 0,4843877. Hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan tempat pelayanan kesehatan. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi memilih puskesmas dan rumah sakit jika mengalami masalah gangguan kesehatan. Namun tidak semua masyarakat berpendapatan tinggi yang pergi ke rumah sakit atau Puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagian memilih untuk berobat ke bidan setempat saja. Karena kalau harus ke Rumah Sakit atau Puskesmas maka harus menyeberang dengan sampan, sementara kondisi badan sedang tidak sehat.

Sementara masyarakat yang tingkat pendapatannya sedang sebagian memilih Rumah Sakit namun sebagian memilih untuk berobat ke bidan karena letak puskesmas yang jauh. Sedangkan masyarakat yang berpendapatan rendah lebih memilih untuk membeli obat di warung - warung kecil yang ada di Matiti II. Kalupun harus ke Puskesmas dikarenakan penyakit yang sudah cukup parah seperti harus rawat inap.

Hubungan antara Pendapatan dan Tipe Rumah

Tabel 3

Hubungan antara Tingkat Pendapatan dengan Tipe Rumah yang dimiliki Rumah Tangga

		Tipe Rumah			Total
		Permanen	Semi Permanen	Non Permanen	
Pendapatan Masyarakat (Rp/bulan)	Rendah (500.000– 1.500.000)	0	8	51	59
	Sedang > 1.500.000 – 2.500.000	1	17	7	25
	Tinggi > 2.500.000	8	8	0	16
Total		9	33	58	100
Nilai Chi Square : 74.713					
Nilai x ² tabel df 4 α : 0.05 adalah 9.48773					
Koefisien Kontingensi : 0.653936					

Sumber : Diolah dari Data Primer 2015

Nilai koefisien kontingensi hubungan antara tingkat pendapatan dengan tipe rumah yang dimiliki rumah tangga $> 0,5$ yaitu 0,653936. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan tipe rumah yang dimiliki rumah tangga. Artinya hanya rumah tangga yang tingkat pendapatannya tinggi saja yang memiliki rumah tipe permanen, sedangkan yang berpendapatan rendah rumah yang dimiliki adalah non permanen.

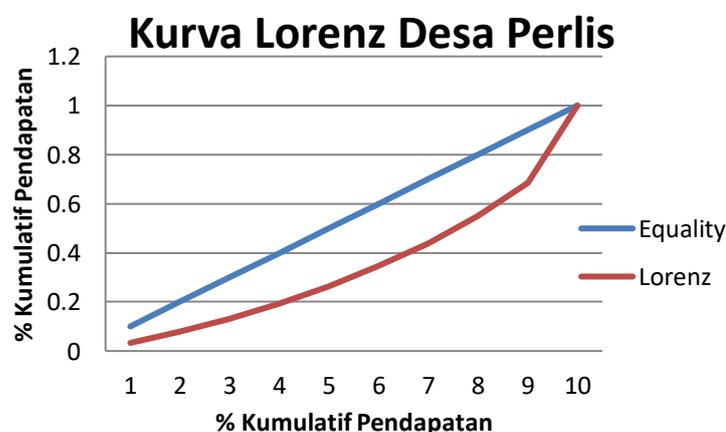
Hal ini di karenakan mereka memiliki uang yang berlebih untuk dapat rumah permanen. Karena biaya pembangunan rumah di Desa Matiti II jauh lebih tinggi dibandingkan membangun rumah di daerah lain. Sementara masyarakat yaang berpendapatan sedang memiliki tipe rumah semi permanen yaitu bagian bawah rumah dari batu namun bagian dinding atasnya terbuat dari papan/kayu. Kalau untuk membeli bahan bangunan mereka mampu, namun karena jalur transportasi darat yang tidak tersedia yang menyebabkan tingginya biaya pengangkutan bahan bangunan membuat mereka hanya mampu membangun rumah semi permanen saja. Di Matiti II, akan sangat jarang dijumpai tipe - tipe rumah permanen. Sebagian besar rumah tangga malah membangun rumah mereka diatas air. Akan sangat sulit dijumpai rumah - rumah yang memiliki halaman dengan taman bunga dan taman untuk bermain anak-anak mereka. Anak-anak di Matiti II menghabiskan waktu dengan berenang di air laut sambil mencari ikan.

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Desa Matiti II

Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini dinyatakan dalam proporsi pendapatan yang diterima oleh kelompok penerima pendapatan yaitu kepala rumah tangga yang ada di Desa Matiti II. Analisis ketimpangan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan Koefisien Gini, Kurva Lorenz dan Ukuran Bank Dunia. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan ketiga metode ini untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode.

Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di Desa Matiti II dengan metode Koefisien Gini yaitu dengan berdasarkan kumulatif pendapatan rumah tangga dan kumulatif jumlah rumah tangga. Hasil perhitungan Koefisien Gini untuk Desa Matiti II diperoleh angka sebesar 0,355636758. Hal ini berarti tingkat ketimpangan pendapatan di Desa Matiti II jika diukur dengan menggunakan Koefisien Gini berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Oshima masuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika kondisi ketimpangan di Desa Matiti II digambarkan kedalam kurva Lorenz maka akan terlihat seperti pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Kurva Lorenz Desa Matiti II

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penghitungan ketimpangan dengan menggunakan Koefisien Gini hanya melihat tingkat ketimpangan secara umum namun tidak menjelaskan dimana letak ketimpangannya. Karenanya para ahli menyarankan pengukuran dengan Koefisien Gini dilengkapi dengan ukuran lain seperti Kriteria Bank Dunia sehingga diketahui dimana terjadinya ketimpangan tersebut apakah pada masyarakat yang berpendapatan rendah atau pada masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Analisis ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia yakni dengan mengelompokkan pendapatan responden kedalam kelompok 40 % berpendapatan rendah, 40% berpendapatan sedang dan 20 % berpendapatan tinggi. Namun yang dilihat hanyalah kelompok yang berpendapatan terendah. Hasil analisis distribusi pendapatan responden dengan ukuran Bank Dunia dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4
Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Desa Matiti II

No.	Kelompok Rumah Tangga (Kriteria Bank dunia)	Jumlah Pendapatan/bulan (Rp)	Persentase Pendapatan (%)
1.	40 % pendapatan rendah	34.625.000	19,24
2.	40 % pendapatan sedang	64.510.000	35,85
3.	20 % pendapatan tinggi	80.800.000	44,91
Jumlah		179.935.000	100

Sumber: Diolah dari Data Primer tahun 2015

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah pendapatan dari 40 % pendapatan rumah tangga yang terendah adalah sebesar Rp. 32.650.000 atau 18,75 % dari total pendapatan rumah tangga di Desa Matiti II. Oleh karena 40% pendapatan terendah menikmati sebesar 18,75 persen dari total seluruh pendapatan rumah tangga yang artinya > 17 persen dari total pendapatan, maka ketimpangan distribusi pendapatan di Desa Matiti II berdasarkan ukuran Bank Dunia tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Persentase pendapatan rumah tangga menurut kelompok penerima



Gambar 2
Persentase Pendapatan Rumah Tangga menurut Kelompok Penerima Pendapatan di Desa Matiti II

Penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan Ukuran Bank Dunia dan koefisien Gini memberikan hasil yang sama yaitu tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Desa Matiti II masuk dalam kategori rendah.

Berdasarkan kriteria uji yang diberlakukan untuk hipotesis penelitian, maka diperoleh keputusan untuk menolak hipotesis penelitian yang mengatakan ketimpangan distribusi pendapatan di Desa Matiti II tergolong kategori sedang atau tinggi (distribusi pendapatan yang relatif tidak merata). Karena ternyata tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Desa Matiti II masuk dalam kategori rendah.

Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Wilayah

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam pengembangan wilayah. Jika pendapatan masyarakatnya tinggi maka pengembangan wilayah pada daerah tersebut umumnya berjalan cepat. Namun tidak demikian yang terjadi jika pendapatan yang tinggi itu juga diiringi dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi pula.

Namun jika tingkat pendapatan masyarakatnya tinggi dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya rendah yang berarti pendapatan terdistribusi secara merata maka seharusnya wilayah tersebut berkembang cepat dan mengalami perubahan kearah yang lebih baik (maju).

Namun tidak demikian halnya yang terjadi di Desa Matiti II dimana tingkat pendapatan masyarakatnya tinggi dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya rendah namun wilayahnya belum mengalami perkembangan kearah yang lebih maju. Tingkat pendapatan masyarakatnya cukup tinggi yaitu pendapatan perkapita masyarakatnya Rp. 443.190,- (data primer) yang berarti berada jauh diatas batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yaitu Rp. 222.898,- untuk wilayah pedesaan. Dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah ini masuk dalam kategori rendah dengan nilai Koefisien Gini hanya 0.355636758.

Kondisi geografis wilayah ini menjadikan aksesibilitas menuju ke wilayah ini menjadi sangat sulit. Tidak ada sarana transportasi darat yang dapat digunakan untuk menjangkau wilayah ini. Berdasarkan pengamatan di lapangan faktor minimnya ketiadaan sarana transportasi darat yang menghubungkan wilayah ini dengan wilayah lain yang menjadikan wilayah ini menjadi tertinggal dari wilayah lain dan membuat wilayah ini berada dalam kondisi miskin, yakni miskin fasilitas.

Selain ketiadaan sarana transportasi darat yang menghubungkan Desa Matiti II dengan wilayah lain di sekitarnya, di Desa Matiti II sendiri belum tersedia sarana transportasi yang memadai yang menghubungkan Matiti II secara keseluruhan. Sarana transportasi yang memadai maksudnya adalah sarana transportasi yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Jalan-jalan yang ada di Desa Matiti II hanya layak digunakan untuk berjalan kaki, walaupun akan dilalui oleh kendaraan roda dua, harus berhati - hati karena kondisi jalan yang sempit dan sebagian besar dibangun diatas air dengan menggunakan penyangga di bawahnya. Karenanya akan sangat sulit dijumpai orang-orang berlalu lalang dengan menggunakan kendaraan di sana seperti di daerah - daerah lain.

Tak hanya sarana transportasi, ketersediaan air bersih pun sulit di Matiti II. Air bersih yang dimaksud adalah yang berasal air bersih yang berasal dari PAM (PDAM). Hanya tersedia satu buah sumur bor yang dibangun oleh PDAM di Matiti II dan sumur ini lah yang digunakan masyarakat untuk memperoleh air bersih. Pada jam-jam tertentu dimana ibu-ibu mencuci pakaian maka akan terlihat antrian di sumur bor tersebut. Hal seperti ini juga akan sangat jarang kita jumpai di wilayah lain.

Kondisi wilayah Desa Matiti II yang sulit dijangkau dan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di sana menjadikan wilayah ini tidak terlihat oleh pihak luar. Wilayah ini jarang dikunjungi oleh masyarakat luar karena untuk ke Matiti II maka harus menyeberang dengan menggunakan sampan dayung, dan sesampainya di sana maka kita harus berkeliling dengan berjalan kaki. Hal ini membuat Desa ini tidak menarik bagi pihak swasta untuk

menanamkan modalnya di sana. Karena jika membangun usaha di sana maka biaya produksi pasti akan tinggi dikarenakan sulitnya aksesibilitas ke wilayah ini.

Ternyata dalam pengembangan suatu wilayah tidak hanya dibutuhkan pendapatan masyarakat yang tinggi saja, namun ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang perkembangan suatu wilayah. Karena dengan tersedianya sarana transportasi yang baik maka aksesibilitas keluar dan masuk ke suatu wilayah menjadi lebih cepat, mudah dan lancar. Dengan aksesibilitas yang cepat, mudah dan lancar maka dapat menarik minat swasta untuk dapat menanamkan modal disana. Dengan demikian maka wilayah akan berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah yang berujung pada peningkatan perekonomian masyarakat dan potensi ekonomi lokal pun bisa turut dikembangkan pula.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Antara tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat pendidikan kepala keluarga dan tempat mendapatkan pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang tidak signifikan. Sedangkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tipe rumah yang dimiliki adalah signifikan.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan di Desa Matiti II masuk dalam kategori rendah. Untuk mengembangkan suatu wilayah yang dibutuhkan bukan hanya tingkat pendapatan yang tinggi dan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah saja, namun faktor kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang sangat penting. Karena dengan aksesibilitas yang sulit dan minimnya transportasi menjadikan wilayah menjadi tertutup dari wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan distribusi pendapatan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Balintfy, J. L., & Goodman, S. S. (1973). Socio-economic factors in income inequality: a log-normal hypothesis. *Zeitschrift für Nationalökonomie/Journal of Economics*, (H. 3/4), 389-402.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4 Edition. London: Sage
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79-88
- Miraza, B.H. 2005. Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah. *Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vol.1 Nomor 2 Desember 2005.
- Munir, B. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Badan Penerbit BAPPEDA Propinsi NTB.
- Napitupulu, R. S., Saragih, J. R., Hutagalung, G., & Situmeang, R. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil Provinsi Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Terhadap Produk

- Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 75-84
- Nasution, A. 2009. Pengaruh Pengembangan Wilayah (Aspek Ekonomi Sosial dan Budaya) terhadap Pertahanan Negara di Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. *Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Vol 4 No. 3 April 2009. Medan
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan batu Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten Labuhan batu Selatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Rahmawati, F., Ananda, F. P., & Narmaditya, B. S. (2020). Socio-Economic Indicators and Income Inequality: Lesson from West Java in Indonesia. *Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration*, 28(3).
- Roth, B., Hahn, E., & Spinath, F. M. (2017). Income inequality, life satisfaction, and economic worries. *Social Psychological and Personality Science*, 8(2), 133-141.
- Saragih, B. S., Siregar, R. T., Manullang, M., & Matondang, S. (2020). Peranan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagori Nagur Usang Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 1-13
- Sianipar, R. M., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Kebijakan Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Eks Pasar Aksara Di Kota Medan. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 103-116
- Sidik, M. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Sitanggang, R. 2007. Pengaruh Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) dalam Pengembangan Wilayah Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun. *Tesis PWD Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 135-148.
- Tampubolon, A. N., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Lokal Tepi Danau Toba Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 67-78